SEMINAR PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE

EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

Aplikasi PERISAI — Pelaporan Informasi Berita Terkini

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

MUHAMMAD ILYAS - 199708062017121005

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

A. PENGANTAR

Aplikasi PERISAI dalam Tata Kelola Kehumasan

PERISAI (Pelaporan Informasi Berita Terkini) adalah aplikasi yang dibangun Kanwil Kemenkum NTB untuk mengakomodir pelaporan link publikasi pemberitaan kegiatan di Kanwil Kemenkum NTB — baik media internal maupun eksternal — guna mengukur kinerja pemberitaan kehumasan.

Isu yang Dievaluasi

Implementasi PERISAI : belum memiliki SOP penggunaan yang baku.

DASAR HUKUM

Regulasi Rujukan Evaluasi

01

Perpres No. 95 Tahun 2018

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) — dasar tata kelola nasional.

02

Permenkum No. 35 Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum.

03

Permenpanrb No. 8 Tahun 2026

Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

Kondisi Saat Ini

- Aplikasi PERISAI sudah dibangun & berjalan dengan fitur teknis lengkap (dashboard, input data, laporan, konfigurasi).
- Belum tersedia SOP tertulis yang mengatur alur kerja, tanggung jawab, dan batas waktu penggunaan aplikasi.
- Penggunaan aplikasi bergantung pada inisiatif masing-masing petugas humas tanpa acuan baku.
- Belum ada monitoring/evaluasi kepatuhan input data yang terjadwal, maupun modul onboarding bagi pengguna baru.
- Aplikasi belum di-update mengikuti perubahan nomenklatur: masih tertulis "Kementerian Hukum dan HAM", serta masih memuat Unit Pelaksana Teknis (UPT)/satuan kerja lama.

B. IDENTIFIKASI KONDISI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Tersedia SOP resmi penggunaan PERISAI: peran, alur kerja input-verifikasi-pelaporan, dan batas waktu.
- Seluruh satker konsisten & tepat waktu menginput data link pemberitaan sesuai jadwal SOP.
- Monitoring & evaluasi pemanfaatan aplikasi dilakukan berkala oleh Humas Kanwil.
- Tersedia modul sosialisasi/pelatihan standar bagi seluruh pengguna baru.
- Aplikasi PERISAI belum diperbarui (update), karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

B. GAP ANALYSIS

Kesenjangan: Kondisi Saat Ini vs Diharapkan

Aspek	Saat Ini	Diharapkan
Pedoman Penggunaan	Belum ada SOP tertulis	SOP resmi mengatur alur & tanggung jawab
Monitoring & Evaluasi	Insidentil, belum terjadwal	Berkala (mingguan/bulanan)
Pelatihan/Onboarding Pengguna	Pemahaman pengguna terhadap fitur aplikasi bervariasi, bergantung pada inisiatif anggota Humas.	Seluruh pengguna baru mendapat pembekalan standar (sosialisasi/pelatihan) sebelum mengoperasikan aplikasi.
Pembaharuan	Aplikasi masih mencantumkan Unit Pelaksana Teknis (UPT).	Aplikasi diperbarui.

C. KESIMPULAN EVALUASI

Kesimpulan

Secara teknis, aplikasi PERISAI sudah memadai — namun implementasinya belum optimal karena belum didukung SOP yang baku.

- Fitur aplikasi (dashboard, input data, laporan, konfigurasi) sudah cukup lengkap untuk mendukung tugas kehumasan.
- Ketiadaan SOP menyebabkan pemanfaatan aplikasi tidak merata antar anggota Humas Kanwil Kemenkum NTB.
- Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tata kelola SPBE pada Perpres 95/2018 dan Permenkum 35/2025.
- Aplikasi PERISAI juga belum diperbarui, masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

D. REKOMENDASI

Rekomendasi

01

Susun & Tetapkan SOP

Menyusun SOP penggunaan PERISAI: alur input, batas waktu, peran & tanggung jawab.

02

Sosialisasi & Pelatihan

Melakukan sosialisasi dan pelatihan SOP aplikasi PERISAI kepada seluruh anggota humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

03

Monitoring Berkala

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi secara berkala (mingguan/bulanan).

04

Integrasi Tata Kelola

Mengintegrasikan SOP PERISAI ke kebijakan tata kelola SPBE Kanwil (Permenkum 35/2025).

05

Pembahruan Aplikasi

Melakukan pembaruan (update) aplikasi PERISAI

Rencana Tindak Lanjut

1

1 BULAN

Jangka Pendek

Menyusun draf SOP penggunaan PERISAI & mengajukan update aplikasi ke pengelola.

2

2–3 BULAN

Jangka Menengah

Finalisasi & penetapan SOP melalui SK pimpinan, dilanjutkan sosialisasi ke seluruh anggota Humas Kanwil Kemenkum NTB.

3

BERKELANJUTAN

Jangka Panjang

Monitoring-evaluasi kepatuhan secara berkala & review SOP secara periodik.

TERIMA KASIH

Evaluasi Implementasi SPBE — Aplikasi PERISAI

Muhammad Ilyas — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat